



LAPORAN

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN,
PENGKOORDINASIAN, FASILITASI,
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PKT UMUM, INTI DAN PILIHAN BAGI
JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA
URUSAN PEMERINTAH KONKUREN,
PERANGKAT DAERAH PENUNJANG DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM TA. 2023**

**BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PROVINSI
SUMATERA
BARAT
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	5
D. Waktu dan Penyelenggara	6
E. Pembiayaan	7
F. Tim Pelaksana Kegiatan	8
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Penilaian Survei Awal Kebutuhan Diklat	10
B. Responden	10
C. Kuesioner	11
D. Metode Analisa Data	11
E. Alokasi Waktu	11
F. Wawancara dan Pembahasan	12
F. Tahapan Kegiatan	13
BAB III HASIL YANG DICAPAI	
A. Data Hasil Survei	15
B. Prioritas Pelatihan Teknis	18
C. Kemanfaatan	23
D. Permintaan Fasilitas <i>In House Training</i>	23
E. Evaluasi	24
F. Hambatan dan Permasalahan	24
G. Solusi atas Permasalahan	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN	

BAB III

HASIL YANG DICAPAI

A. DATA HASIL SURVEI

Analisis terhadap Hasil Survei Kebutuhan Data Pelatihan Teknis dilaksanakan dengan:

1. melakukan pe-ranking-an/mencari persentase dari hasil tanggapan Responden;
2. meng-interpretasi jawaban Responden tersebut berdasarkan hasil persentase;
3. melakukan analisa terhadap data;
4. menetapkan prioritas Pelatihan Teknis, tema *Podcast HRD* dan tema *Coaching Clinic*.

Feedback dari kuesioner yang dibagikan terkumpul dari 40 (empat puluh) OPD dengan distribusi Responden sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Pejabat Struktural | : 72 orang |
| 2. JFT | : 128 orang |
| 3. JFU | : 73 orang |
| 4. <u>Tidak mengisi data</u> | <u>: 11 orang</u> |
| Jumlah | : 284 orang |

Sedangkan rentang pengalaman kerja Responden sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Masa kerja < 5 tahun: | 104 orang |
| 2. 5 – 10 tahun | : 96 orang |
| 3. 10 tahun | : 77 orang |
| 4. <u>Tidak mengisi</u> | <u>: 7 orang</u> |
| Jumlah | : 284 orang |

Dari rentang data diatas dapat disimpulkan bahwa Responden sebagian besar adalah PNS yang sudah lama bekerja dengan asumsi pengalaman kerjanya sudah lumayan luas, sehingga diharapkan hasil survei akan lebih baik.

Berdasarkan hasil survei tersebut diperoleh data Pelatihan Teknis yang dibutuhkan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/ kota, saran dan masukan. Dilakukan analisa dan pembahasan untuk penetapan prioritas Pelatihan Teknis yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 (DPA Perubahan) dan pada Tahun 2024.

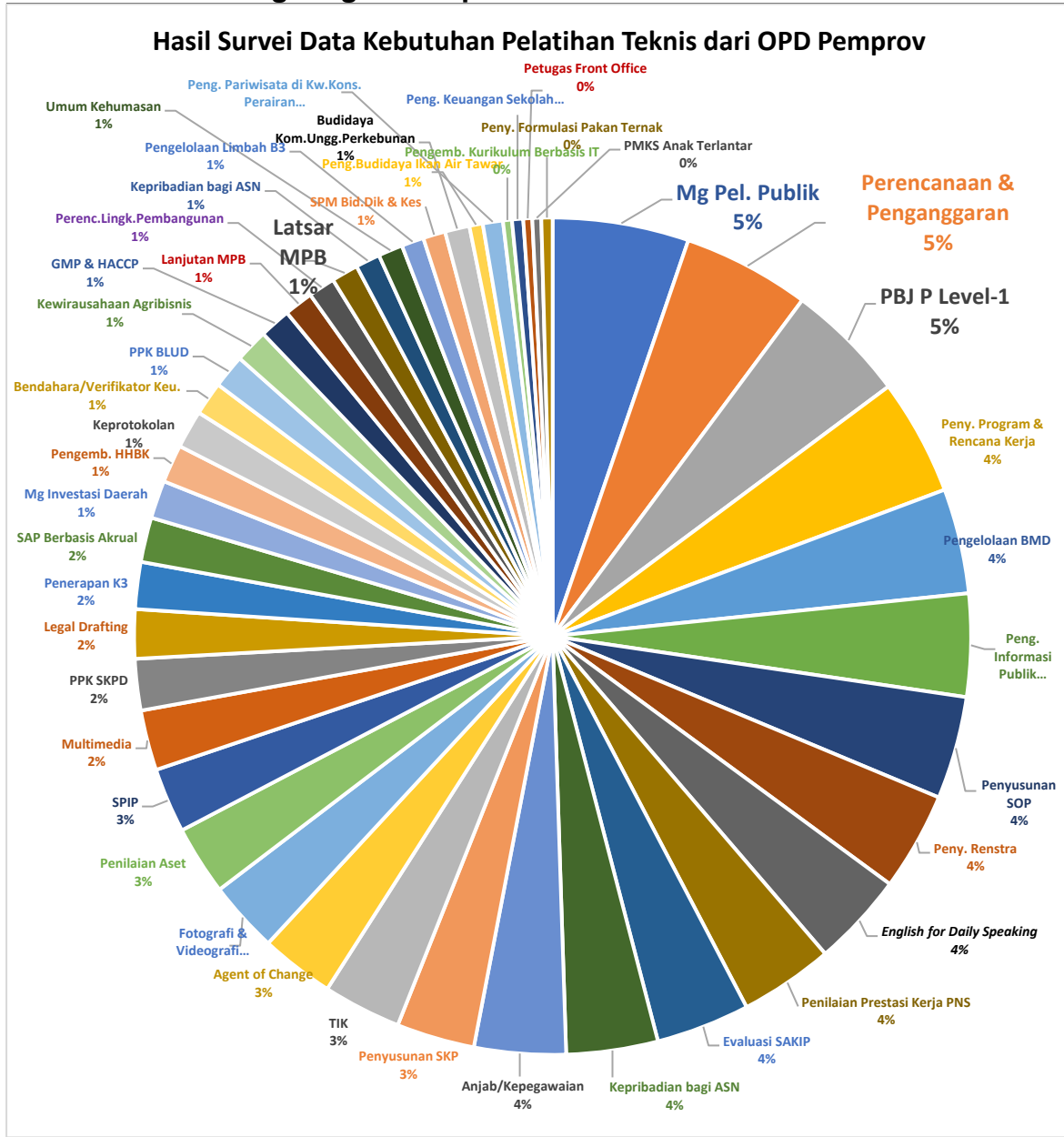
Tabel 1
Peringkat Pelatihan Teknis Hasil Survei Tahun 2023

No	Pelatihan Teknis	Frekuensi
1	Manajemen Pelayanan Publik	61
2	Perencanaan dan Penganggaran	57
3	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	54
4	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	52
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	47
6	Pengelolaan Informasi Publik	46
7	Penyusunan SOP	46
8	Penyusunan Renstra	44
9	<i>English for Daily Speaking</i>	42
10	Penilaian Prestasi Kerja PNS	42
11	Evaluasi SAKIP	42
12	Kepribadian bagi ASN	41
13	Analisa Jabatan/Kepegawaian	41
14	Penyusunan SKP	35
15	Teknik Informasi dan Komunikasi	35
16	<i>Agent of Change</i>	33
17	Fotografi & Videografi	32
18	Penilaian Aset	31
19	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	29
20	Multimedia	27
21	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	23
22	<i>Legal Drafting</i>	22
23	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	21
24	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua	20
25	Manajemen Investasi Daerah	17
26	Pengembangan Hasil Hutan Bukan kayu	17
27	Keprotokolan	17
28	Bendahara/Verifikator Keuangan	15
29	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BLUD	15
30	Kewirausahaan Agribisnis	15
31	<i>Good Manufacturing Product & Hazard Analysis and Critical Control Points (GMP & HACCP)</i>	14
32	Manajemen Penanggulangan Bencana Lanjutan	13
33	Perencanaan Lingkungan Pembangunan	12
34	Latsar Manajemen Penanggulangan Bencana	12
35	Kepribadian bagi ASN	11
36	Umum Kehumasan	11
37	Pengelolaan Limbah B3	10
38	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan & Kesehatan	10
39	Budidaya Komoditas Unggulan Perkebunan	11
40	Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar	6
41	Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Kons. Perairan	9
42	Pengembangan Kurikulum Berbasis IT	4
43	Pengelolaan Keuangan Sekolah	5
45	Petugas <i>Front Office</i>	4

46	PMKS Anak Terlantar	4
47	Penyusunan Formulasi Pakan Ternak	5
	Jumlah	1.160

Sumber: Hasil Survei AKP OPD Pemprov. oleh Bidang PKT Tahun 2023

Gambar 3
Diagram Lingkaran Hasil Survei Data Kebutuhan Pelatihan Teknis OPD
di lingkungan Pemprov Sumbar Tahun 2023



Sumber: Hasil Survei AKP OPD Pemprov. Bidang PKT Tahun 2023

B. PRIORITAS PELATIHAN TEKNIS

Dari data pelatihan teknis tersebut selanjutnya disusun prioritas Pelatihan Teknis, yaitu 10 (sepuluh) besar Pelatihan Teknis yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan 2023 (Perubahan). Namun tidak sepenuhnya dapat mempedomani hasil survei karena ada pertimbangan khusus/ kebijakan sesuai arahan Gubernur atau yang bersifat *Emmergensis* dilaksanakan, seperti:

1. BPSDM telah memperoleh Sertifikasi sebagai LPPBJ dengan nilai Akreditasi Sangat Baik (A) dan Manajemen Penanggulangan Bencana dengan nilai Akreditasi B dan sedang mengupayakan untuk memperoleh Akreditasi Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Tahun 2023 ini. Walaupun berdasarkan minat responden rendah, tetap diprioritaskan untuk dilaksanakan di Tahun 2024.
2. Dengan adanya temuan BPK terhadap pengelolaan keuangan, perlu dipertimbangkan untuk menyelenggarakan Pelatihan Penatausahaan Keuangan, seperti: Bendahara/Verifikator Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD atau Pelatihan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (PPK BLUD) dan sedang diupayakan untuk memperoleh Akreditasi di Tahun 2023 ini. PPK BLUD direncanakan pada Tahun 2024 karena sudah ada 44 (empat puluh empat) SMA/SMK dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi telah menerapkan PPK BLUD dan sisanya didorong secara mandiri.
3. Gubernur mengharapkan agar setiap ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh Pembekalan Kader Bela Negara, setelah Eselon I dan II secara bertahap akan dilaksanakan untuk eselon III, dan telah diakomodir dalam RKA.
4. Dengan beralihnya metoda pembelajaran menjadi *e-learning* dan *Blended learning*, perlunya peningkatan kompetensi teknis ASN dalam hal Teknis Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Pelatihan Fotografi dan Videografi.

Berdasarkan interpretasi terhadap data kebutuhan pelatihan teknis

disusun prioritas pelatihan teknis yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan 2024, sebagai berikut:

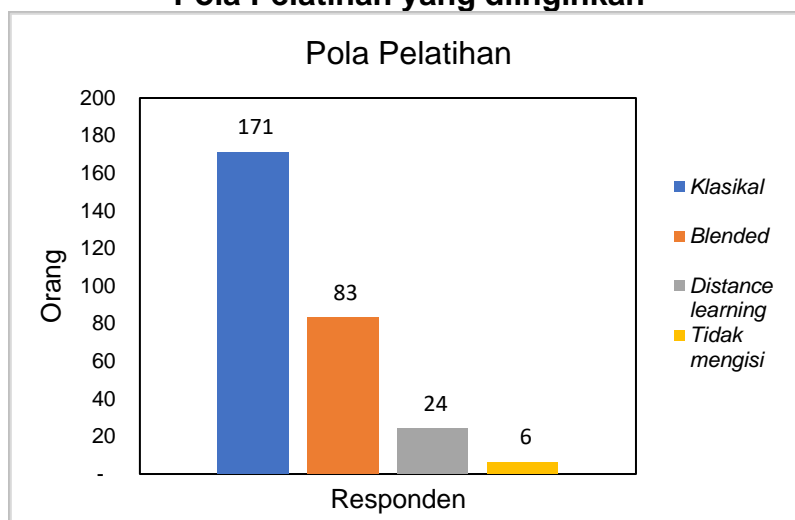
Tabel 2
Prioritas Pelatihan Teknis pada Tahun 2024 (2023)

No	Pelatihan Teknis	Keterangan
1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	Wajib, Akreditasi B
2	Manajemen Penanggulangan Bencana	Wajib, Akreditasi B
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur (Eselon III)	Wajib, arahan Gubernur
4	Pengelolaan Keuangan Daerah	Temuan BPK
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
6	<i>English for Daily Speaking</i>	Arahan Gubernur, kebutuhan ASN
7	Manajemen Pelayanan Publik	
8	Perencanaan dan Penganggaran	
9	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	
10	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	

Sumber: Hasil Pembahasan bersama Kepala BPSDM dan Bidang PKT

Berdasarkan pengolahan data kuesioner sesuai jawaban Responden OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (*Summary*) diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4
Pola Pelatihan yang diinginkan



Keterangan tabel:

Walau telah terjadi perubahan trend dan paradigma *Training* dari Klasikal menjadi *e-learning*, namun sebanyak 171 orang Responden masih menginginkan Pola Pelatihan secara Klasikal, 83 orang secara *Blended learning* dan 24 orang secara *Full distance learning*.